

**PERAN INTERNASIONAL CONTACT GROUP DALAM MEDIASI KONFLIK  
ANTARA PEMERINTAH FILIPINA DAN MORO ISLAMIC LIBERATION FRONT**

**TAHUN 2009 – 2012**

Heny Istiqomah

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Udayana

1021105045

Email: [henyistiqomah93@yahoo.com](mailto:henyistiqomah93@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*The Philippines government has had a prolonged conflict with armed groups in Mindanao, Southern Philippines. One of the most influential groups in Mindanao is the MILF which was established in 1984 by Salamat Hasim. Peace process has been done since 1996 but always failed and finally succeeded by the signing of the framework of final peace agreement in 2012 between Philippines government and MILF. The successful agreement reached after negotiation involving third party that is the ICG as a mediator, held. ICG was formed in 2009 consists of United Kingdom, Turkey, Japan, Saudi Arabia, Muhammadiyah, Conciliation Resources, Humanitarian Dialogue Centre, and The Asia Foundation. Therefore, this study aims to describe what roles is ICG played in the conflict mediation between the Philippines government and the MILF in 2009 – 2012. The research shows that ICG has involved in facilitative mediation as explorer, reassure, unifier, convener, facilitator, envisioner, enhancer, guarantor, and legitimizer. This study shows that conflict resolution involving mediation group whose members consists of different backgrounds, match with the conflicts based on ethnicity, culture and religion.*

**Keywords:** peace process, facilitative mediation

**A. PENDAHULUAN**

Secara geografis wilayah Filipina terbagi menjadi tiga kepulauan besar, yaitu di bagian Utara dengan Kepulauan Luzon,

bagian Tengah yaitu Kepulauan Visayas, dan Kepulauan Mindanao (Mindanao, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, dan Palawan)

berada di Selatan. Terdapat perbedaan demografi antara ketiga wilayah tersebut. Penduduk di Utara dan Tengah merupakan Filipino (suku asli Filipina), sedangkan mayoritas penduduk di Selatan merupakan muslim melayu yang dikenal dengan Bangsamoro.

Konflik terbuka antara pemerintah Filipina dan Bangsamoro mulai berlangsung sejak akhir tahun 1960-an. Konflik ini dipicu oleh adanya perpindahan penduduk Luzon dan Visayas ke Mindanao yang dirancang dalam program kebijakan Pemerintah. Bangsamoro merasa terpinggirkan dengan adanya pendatang tersebut (Guerra, 2010). Perpindahan ini menyebabkan munculnya sengketa lahan, pergeseran kekuasaan, perpindahan ekonomi dari Bangsamoro ke pendatang, dan stereotip dari pendatang terhadap Bangsa Moro (Guerra, 2010). Akibatnya, Bangsamoro kehilangan status dan rasa hormat di wilayah mereka sendiri. Hal ini memicu timbulnya kebencian Bangsamoro terhadap pemerintah.

Kebencian ini memicu terbentuknya kelompok-kelompok pemberontak di Mindanao. Salah satu kelompok pemberontak yang sangat berpengaruh di Mindanao adalah MILF (Moro Islamic Liberation Front) yang dibentuk oleh Salamat Hasim pada tahun

1984. MILF merupakan kelompok bersenjata yang berjuang memperjuangkan kepentingan rakyat Mindanao yang berusaha membebaskan Bangsamoro dari pemerintah Filipina dan mendirikan negara sendiri berbasis Islam.

MILF telah melakukan berbagai serangan. Serangan ini memakan banyak korban terutama rakyat sipil. Hal ini menyebabkan pemerintah Filipina mengupayakan adanya jalan damai. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan berbagai negosiasi dengan pimpinan MILF sejak tahun 1996.

Berbagai pihak telah berusaha membantu proses damai di Filipina seperti Malaysia dan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Namun, bantuan tersebut selalu mengalami kegagalan. Kegagalan ini melatarbelakangi terbentuknya kelompok mediasi yaitu ICG (International Contact Group) yang telah dibentuk dan disetujui oleh kedua pihak.

ICG merupakan badan *ad-hoc* yang dibentuk oleh Pemerintah Filipina dan MILF pada tanggal 4 Desember 2009. ICG terdiri dari empat negara yaitu Inggris, Turki, Jepang, Arab Saudi dan empat NGOs (*Non-governmental Organizations*) yaitu Muhammadiyah, Conciliation Resources, The Henry Dunant Centre atau

Humanitarian Dialog Centre, dan The Asia Foundation.

Masuknya ICG dalam penyelesaian konflik di Mindanao telah menghasilkan kemajuan. Kemajuan yang dapat dilihat secara jelas yaitu dengan adanya

penandatanganan FAB (Framework Agreement of Bangsamoro) pada 15 Oktober 2012. Kemajuan besar yang dibawa oleh ICG menyebabkan penulis ingin mengkaji lebih banyak tentang peran yang dilakukan oleh ICG di Filipina.

## B. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini digunakan empat konsep untuk membangun penelitian ini, yaitu:

### 1. Konflik *intrastate*

Konflik *intrastate* adalah konflik bersejata yang terjadi dalam wilayah suatu negara (Acikalin, 2011). Jika dibandingkan dengan konflik *interstate*, konflik *intrastate* lebih banyak melibatkan aktor negara dan non-negara. Dilihat dari kedudukan pihak yang berkonflik, konflik *intrastate* dibagi menjadi dua yaitu konflik horizontal dan vertikal.

Dalam penelitian ini digunakan konsep konflik *intrastate* vertikal untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah Filipina dan MILF. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki kedudukan atau status sosial yang berbeda. Snitwongse & Thompson (2005) menjelaskan konflik vertikal sebagai konflik yang terjadi antara

pemerintah dan kelompok tertentu (berbasis etnis, agama atau ideologi) dalam satu wilayah negara.

### 2. Peran fungsional (*functional role*)

Banyak ahli sosiologi yang mengembangkan konsep peran seperti Ralph Linton dan Michelle F. Hindin. Untuk menjelaskan konsep tersebut, Ralph Linton membedakan antara status dan peran. Menurut Linton (dikutip dalam Ritzer, 2007, p. 3960) status adalah kumpulan dari hak dan kewajiban sedangkan, peran adalah aspek dinamis dari status itu sendiri. peran fungsional dapat dikatakan sebagai perilaku yang dilakukan untuk memenuhi fungsi secara spesifik (Bates & Harvey seperti dikutip dalam Biddle, 1986).

### 3. Mediasi fasilitatif (*facilitative mediation*)

mediasi fasilitatif bertugas untuk memfasilitasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah baik kedua pihak yang bertikai maupun fasilitator

dalam upaya perdamaian. Mediator menjaga komunikasi antar pihak agar negosiasi tetap berjalan sampai terjadi kesepakatan damai (Jeong, 2010). Mediator hanya memfasilitasi komunikasi dan tidak mempengaruhi hasil negosiasi secara langsung (Jeong, 2010). Mediator bertanggung jawab atas proses, sementara yang bertanggung jawab atas hasilnya adalah pihak yang berkonflik itu sendiri.

Mitchell (2003) menjelaskan beberapa peran yang sering dilakukan oleh mediator dalam mediasi konflik yaitu *explorer, reassurer, decoupler, unifier, ensembler, convener, facilitator, ensembler, enhancer, guarantor, legitimizer, verifier, implementer,*

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang peran ICG dalam mediasi konflik antara pemerintah Filipina dan MILF merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan & Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diakui (dikutip dalam Moleong, 2002).

*reconciler*. Konsep ini cocok untuk dipakai dalam mediasi yang bersifat fasilitatif karena menekankan peran sebagai mediator yang hanya memfasilitasi upaya perdamaian dan tidak mempengaruhi hasil secara langsung. Namun, penulis hanya memakai beberapa peran ini yaitu *explorer, reassurer, unifier, ensembler, convener, facilitator, ensembler, enhancer, guarantor, dan legitimizer*.

#### 4. Mediasi multipartai (*multiparty mediation*)

Mediasi Multipartai adalah kerjasama antara dua mediator atau lebih dalam suatu mediasi (Bohmelt, 2011; Mason & Kassam, 2011).

Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dapat membangun penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli melainkan diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, web resmi, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi (Silalahi, 2012).

#### D. PEMBAHASAN

Filipina merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 ribu pulau yang terbagi menjadi tiga kepulauan besar, yaitu di bagian Utara dengan Kepulauan Luzon, di bagian Tengah yaitu Kepulauan Visayas, dan Kepulauan Mindanao (Mindanao, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, dan Palawan) di bagian Selatan. Pada awalnya Kepulauan Mindanao bukan merupakan bagian dari Filipina. Filipina hanya terdiri dari Kepulauan Luzon dan Visayas. Kepulauan Mindanao merupakan wilayah kesultanan yang berdiri sendiri yang terdiri dari Kesultanan Sulu dan Maguindanao. Wilayah Mindanao menjadi bagian administratif Filipina sejak Amerika yang pada saat itu memegang kuasa di Filipina memberikan kemerdekaan kepada Filipina dengan memasukkan Mindanao sebagai salah satu wilayah didalamnya pada tahun 1946.

Terdapat perbedaan susunan penduduk antara ketiga wilayah tersebut. Penduduk di Utara dan Tengah merupakan Filipino, suku asli Filipina yang mayoritas memeluk agama Katolik, sedangkan penduduk di Selatan merupakan muslim Melayu yang dikenal dengan sebutan Bangsamoro. Sebutan Moro diciptakan

oleh kolonial Spanyol yang berusaha menguasai daerah Mindanao sejak tahun 1656 (Tuminez, 2008). *Moors* adalah orang-orang muslim di Afrika Barat yang merupakan campuran antara suku Barbar dan Arab.

Konflik terbuka antara Bangsamoro dengan pemerintah Filipina mulai berlangsung sejak akhir tahun 1960-an (Adriano & Parks, 2013). Konflik tersebut dipicu oleh Peristiwa Jabidah pada tahun 1968 (Adriano & Parks, 2013). Peristiwa Jabidah adalah peristiwa pembunuhan 28 pemuda Bangsamoro secara massal oleh militer Filipina di Corregidor, Manila (Adriano & Parks, 2013). Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh penolakan Bangsamoro yang dilatih untuk melakukan misi penyerangan dan pengambilalihan Sabah dari Malaysia. Peristiwa Jabidah menimbulkan kemarahan Bangsamoro dan membangkitkan etnonasionalisme yang sekian lama mereka pendam karena adanya isu diskriminasi sosial-ekonomi akibat meningkatnya perpindahan warga Luzon dan Visayas ke Mindanao. Kemarahan ini memicu terbentuknya kelompok-kelompok pemberontak di Mindanao yang menentang pemerintah

Filipina. Kelompok-kelompok tersebut di antaranya adalah MNLF (Moro National Liberation Front), Abu Sayyaf, MNLF-Reformist Group, BMLO (Bangsamoro Liberation Organisation), Islamic Command Council, The Moro Revolutionary Organisation, dan Maranao Islamic Statehood Movement, BLMI (Bangsamoro Liberation Movement Independent), dan MILF (Moro Islamic Liberation Front). Terbentuknya berbagai kelompok separatis tersebut menimbulkan terjadinya konflik *intrastate* di Filipina yang terjadi antara pemerintah Filipina dan kelompok-kelompok tersebut.

Di antara beberapa kelompok separatis tersebut, MILF merupakan kelompok separatis yang paling berpengaruh dan memiliki kekuatan yang besar di Mindanao. Pada akhir tahun 1990-an, MILF mengaku memiliki kekuatan sekitar 120.000 pejuang baik yang bersenjata maupun tidak bersenjata (Conciliation Resources, 1999). MILF didirikan oleh Salamat Hashim pada tahun 1984 dan merupakan pecahan dari MNLF. Salamat Hashim sendiri merupakan wakil ketua MNLF yang pada tahun 1976 berselisih paham dengan ketua MNLF yaitu Nur Misuari. Nur Misuari menerima tawaran otonomi dari pemerintah Filipina sedangkan Salamat Hashim dan

pendukung tetap menginginkan adanya kemerdekaan. Selain itu, terdapat konsep Bangsamoro yang berbeda antara MNLF dan MILF. MNLF mengusung konsep Bangsamoro untuk muslim Mindanao, suku Lumad yang merupakan suku asli, dan warga Katolik yang mendukung gerakan MNLF (Trijino, 2004). Berbeda dengan MNLF, MILF hanya menyebut sebutan Bangsamoro untuk muslim Mindanao dan tidak untuk yang lainnya (Trijono, 2004). Perbedaan ini yang menciptakan perbedaan tujuan perjuangan antara kedua kelompok tersebut. MILF lebih menginginkan pendirian negara yang berbasis islam sedangkan MNLF tidak berbasis Islam.

Konflik antara pemerintah Filipina dan MILF terus berkejolak sampai akhirnya jalan negosiasi dapat ditempuh pada tahun 1996. Upaya damai antara pemerintah Filipina dan MILF dilatarbelakangi oleh kerugian yang ditanggung oleh kedua pihak akibat konflik. Dalam perkembangannya banyak aktor-aktor internasional yang terlibat dalam proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan MILF. Aktor internasional tersebut diantaranya adalah OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang terlibat sejak tahun 1973, Libya yang hanya terlibat pada tahun 2001, Malaysia

sejak tahun 2001 sampai sekarang, dan IMT (International Monitoring Team) yang dibentuk pada tahun 2003.

Upaya damai yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dan MILF hampir berhasil pada tahun 2008 namun harus kembali mengalami kegagalan akibat batalnya penandatanganan MOA-AD (Memorandum of Agreement Ancestral Domain). Kegagalan ini secara umum disebabkan oleh kurangnya konsultasi atau dialog diluar pertemuan formal antara pemerintah Filipina dan MILF beserta konstituen-konstituennya. Kegagalan ini menyebabkan kedua pihak yaitu pemerintah Filipina dan MILF membentuk kelompok mediasi yang terdiri dari berbagai latarbelakang yang berbeda yang dapat mewakili kedua pihak baik dari segi identitas, agama, dan budaya.

Kelompok mediasi tersebut adalah ICG (International Contact Group) yang dibentuk secara resmi pada 15 Oktober 2009. ICG merupakan badan *ad-hoc* yang terdiri dari Inggris, Turki, Jepang, Arab Saudi, Muhammadiyah, Conciliation Resources, The Henry Dunant Centre atau Humanitarian Dialogue Centre, dan The Asia Foundation. Banyaknya mediator yang bekerja sama untuk membantu proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan

MILF disebut sebagai mediator multipartai.

Anggota ICG telah melakukan pertemuan secara informal untuk pertama kalinya pada November 2009 di Manila, untuk menentukan sistem kerja mereka (Herbolzheimer & Leslie, 2013). Dalam pertemuan tersebut, anggota ICG setuju untuk memakai koordinasi renggang sehingga mereka tidak memiliki ketua ataupun sekretariat (Herbolzheimer & Leslie, 2013). ICG hanya memiliki koordinator yaitu HD Centre (Humanitarian Dialogue Centre) yang bertugas untuk menjaga berkas hasil pertemuan antara pemerintah Filipina dan MILF dan menjadi penghubung utama antara Malaysia sebagai fasilitator dengan ICG (Herbolzheimer & Leslie, 2013). Selain itu, ICG juga tidak memiliki sistem hirarki dalam sistem kerja, masing-masing anggota dibebaskan untuk melakukan

peran mereka sesuai dengan keahlian yang dimiliki (Herbolzheimer & Leslie, 2013).

Peran yang dilakukan oleh ICG merupakan peran fungsional yang didasarkan pada fungsi dan mandat yang telah diberikan oleh pemerintah Filipina dan MILF. ICG mempunyai fungsi untuk menghadiri dan mengawasi negosiasi; melakukan kunjungan, pertukaran

pandangan, dan memberikan pandangan; membantu mencari bantuan seperti ahli dan narasumber; dan menghadiri permintaan pertemuan dari pemerintah Filipina dan MILF (Conciliation Resources, 2009). Mandat ICG adalah untuk menerapkan pandangan yang telah disepakati oleh kedua pihak, untuk menentukan sistem kerja, dan melanjutkan peran dan fungsi untuk menjamin kesuksesan implementasi (Conciliation Resources, 2009).

ICG menjadi pihak ketiga secara fasilitatif yaitu segala peran yang dilakukan hanya bertujuan untuk memfasilitasi agar kedua pihak dapat mencapai perjanjian perdamaian. ICG hanya berperan untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang menghambat proses perdamaian dan bukan berfokus pada isu substantif karena isu substantif menjadi tugas Malaysia sebagai fasilitator. Rincian peran individu dan kolektif ICG lebih jelasnya akan ditulis dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Peran Individu dan Kolektif ICG

No	Anggota ICG	Peran yang dilakukan
1	Inggris	<i>Reassurer, Unifier, Enhancer</i>
2	Turki	–
3	Jepang	<i>Convener, Enhancer</i>
4	Arab Saudi	–
5	Muhammadiyah	<i>Explorer, Unifier, Enskiller, Convener</i>
6	Conciliation Resources	<i>Explorer, Enskiller, Facilitator, Enhancer</i>
7	Humanitarian Dialogue Centre	<i>Explorer, Reassurer, Convener, Facilitator, Envioner, Enhancer</i>
8	The Asia Foundation	<i>Explorer, Unifier, Enskiller, Facilitator, Enhancer</i>

9	Peran Kolektif ICG	Explorer, Reassurer, Convener, Facilitator, Envioner, Guarantor, Legitimizer
Peran keseluruhan		Explorer, Reassurer, Unifier, Enskiller, Convener, Facilitator, Envioner, Enhancer, Guarantor, Legitimizer

Berbagai peran yang dilakukan oleh ICG baik secara individu oleh masing-masing anggota maupun secara kolektif akan dijelaskan secara detail dalam penjelasan di bawah ini.

#### 1. Inggris

Dalam menjalankan tugasnya, ICG telah menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut

diantaranya adalah krisis kepercayaan yang dialami oleh Bangsamoro terhadap setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina untuk mencapai perdamaian (Fukunaga, 2013). Rasa ketidakpercayaan Bangsamoro terhadap pemerintah Filipina disebabkan oleh beberapa tindakan Presiden Filipina yang cenderung merugikan mereka. Tindakan tersebut diantaranya adalah Kebijakan *All-out-war* yang dikeluarkan oleh Presiden Joseph Estrada yang menyebabkan ribuan warga sipil menjadi korban. Tindakan Presiden Gloria-Macapagal Arroyo yang pernah melakukan serangan ke Complex Buliox terkait isu teroris, padahal saat itu pemerintah Filipina dan MILF sedang melakukan proses perdamaian. Ketidakpercayaan semakin meningkat ketika penandatanganan MOA-AD dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Filipina.

Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, Anggota ICG telah melakukan beberapa tindakan. Anggota ICG yang melakukannya diantaranya adalah Inggris. Inggris telah menggelar acara Olympic Truce atau sering dikenal dengan Time Out For Football di Zamboanga, Mindanao. Acara yang dilakukan di bulan Mei dan Juni ini

berisi serangkaian pameran sepak bola dan dimeriahkan dengan pertandingan sepak bola yang terdiri dari jajaran AFP (Armed Forces of Philippines), pemerintah pusat, MILF dan masyarakat Mindanao baik Bangsamoro, suku Lumad maupun pendatang yang beragama katolik. Acara ini dimanfaatkan oleh Inggris untuk melakukan peran individunya sebagai anggota ICG. Dalam acara ini, Inggris berperan sebagai *reassurer* dan *unifier*.

Upaya meyakinkan Bangsamoro dilakukan dengan cara memberikan pidato kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi sebelum acara Olympic Truce dimulai. Pidato ini dilakukan oleh perwakilan pemerintah Filipina, MILF, dan Duta Besar Inggris Stephen Lillie. Pidato tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan MILF (Bauzon, 2013). Pidato tersebut juga memotivasi dan meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah Filipina melakukan proses perdamaian secara sungguh-sungguh dan tidak menginginkan adanya kemenangan disalah satu pihak.

Dalam acara tersebut diadakan pula sebuah pertandingan sepak bola pada 19 Juni di Joaquin Enriquez Sports

Complex di Kota Zamboanga. Pertandingan tersebut bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara umat Islam dan Katolik di Mindanao. Berbagai partisipan yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda digabung dalam satu tim namun, hal ini tidak dalam artian satu tim melawan tim yang lain (Government of United Kingdom, 2013). Pertandingan yang diadakan hanya meramaikan acara pameran dan bersifat menghibur. Pertandingan ini dilakukan agar mereka dapat melakukan kerja sama satu sama lain untuk memenangkan pertandingan. Dengan demikian mereka dapat melebur menjadi satu untuk menyusun strategi dan melupakan perbedaan yang ada. Hal ini dapat membangun hubungan yang baik antara umat Islam dan Katolik di Mindanao.

Inggris juga telah berperan sebagai *enhancer* dengan mendatangkan beberapa ahli perdamaian ke Filipina. Kedutaan Inggris telah mengadakan seminar dengan beberapa ahli tersebut (Bauzon, 2013). Salah satunya adalah Cynthia Petrigh yang pernah terlibat dalam beberapa proses perdamaian di Asia dan Afrika. Acara ini dihadiri oleh kalangan konstituen pemerintah Filipina dan MILF. Inggris juga mengambil

bagian untuk berbagi pengalaman mereka dalam proses perdamaian di Irlandia Utara (Bauzon, 2013).

## 2. Turki

Sampai terjadinya penandatanganan FAB tahun 2012, Turki belum melakukan peran secara individu karena adanya kendala. Kendala ini berasal dari kurangnya sumber daya di kedutaan Turki untuk Filipina (Santos, 2013). Oleh karena itu, Turki dirasa sulit untuk melakukan peran individu yang kebanyakan bersifat informal dengan pendekatan dari masyarakat sipil.

## 3. Jepang

Benigno S. Aquino merupakan presiden baru Filipina yang terpilih dalam pemilihan umum yang dilaksanakan pada 10 Juli 2010. Sebagai Presiden baru, Benigno Aquino meminta melakukan pertemuan informal dengan ketua MILF Al Haj Murad untuk memberikan perspektif dan visinya tentang penyelesaian konflik di Mindanao. Benigno S. Aquino ingin mempercepat perjanjian perdamaian untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

Pertemuan tersebut dilakukan di luar Filipina untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan. MILF menerima permintaan untuk bertemu namun

petemuan tersebut harus dilakukan di Jepang (Fukunaga, 2013). Pemerintah Filipina menyetujuinya dan meminta Jepang untuk mempersiapkan pertemuan tersebut. Hubungan baik yang terjalin antara Jepang dan MILF menyebabkan adanya kepercayaan dari MILF untuk melakukan pertemuan di sana. Hubungan baik ini dibangun oleh Jepang dengan memberikan bantuan baik terhadap pemerintah Filipina maupun MILF.

Menanggapi hal tersebut, Jepang telah memenuhi perannya sebagai *convener* dengan menyediakan tempat untuk pertemuan informal pada 4 Agustus 2011 (Minister of Foreign Affairs of Japan, 2014; MindaNews, 2012). Jepang menyediakan tempat pertemuan di Narita, kota di pinggiran Tokyo (Fukunaga, 2013). Tempat ini dianggap sebagai tempat yang aman untuk melakukan pertemuan sesuai permintaan pemerintah Filipina dan MILF.

Peran juga berperan sebagai *enhancer* dengan memberikan bantuan dana dan mendatangkan dua ahli pembangunan sosial-ekonomi untuk berbagi kemampuan mereka dalam sebuah seminar. Pada 7 Juni 2012, Jepang menyumbangkan gedung baru

BLMI (Bangsamoro Leadership and Management) di Maguindanao untuk meningkatkan kapasitas pemimpin Bangsamoro dalam tata pemerintahan, transisi politik, dan kepemimpinan dalam rangka persiapan untuk pembentukan entitas politik baru (Embassy of Japan, 2012).

#### 4. Arab Saudi

Arab Saudi telah mengikuti berbagai pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dan MILF di Kuala Lumpur dengan mengutus perwakilannya dari kedutaan Arab Saudi di Malaysia. Arab Saudi sendiri telah melakukan perannya dalam negosiasi formal sebagai anggota ICG. Arab Saudi lebih berperan secara kolektif dan sampai tahun 2012 belum memiliki peran secara individu maupun informal.

#### 5. Muhammadiyah

Untuk memahami berbagai keluhan dan keinginan Bangsamoro, Muhammadiyah membuat misi *scoping* ke Mindanao yang terdiri dari Dr. Sudibyo Markus (Lembaga Hubungan Luar Negeri Muhammadiyah), Prof. Imam Robandi (Majelis Pendidikan Dasar Menengah), Dr. Surwandono (perwakilan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Dra. Tri Astuti (Pimpinan

Pusat Aisyah, Organisasi Perempuan Muhammadiyah), dan Drs. Ahmad Ma'ruf (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) (Syamsudin, nd).

Misi tersebut dilakukan pada 12 – 21 Juni 2011 dan bertujuan untuk mengetahui hal yang diperlukan oleh Bangsamoro untuk memetakan masalah dan mencari solusi yang tepat. Peran Muhammadiyah untuk memetakan masalah dan memberikan beberapa pilihan solusi dapat dikatakan sebagai *explorer*. Mereka mendatangi masyarakat Mindanao secara langsung untuk melihat lebih jauh mengenai kehidupan mereka. Segala hal yang dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dituangkan dalam Muhammadiyah *Road Map 2020* untuk Bangsamoro. *Road Map* tersebut berisi tentang program pendidikan, kesehatan, perempuan, dan sosial ekonomi untuk Bangsamoro yang rencananya akan diselesaikan sampai tahun 2020. Saat ini Muhammadiyah sedang mengimplementasikan program tersebut yang direncanakan akan selesai pada tahun 2020 (Syamsuddin, n.d).

*Road Map 2020* Muhammadiyah digunakan sebagai acuan untuk melakukan perannya sebagai *enskiller*. Muhammadiyah telah mendatangkan tenaga ahli medis dan guru ke Mindanao

untuk berbagi pengalaman mereka dalam mengelola rumah sakit dan sekolah (Syamsuddin, n.d). Berbagi pengalaman tersebut dilakukan secara langsung dengan mengadakan praktek sehingga Muhammadiyah dapat dikatakan *enskiller* bukan *enhancer*. Upaya Muhammadiyah mendatangkan tenaga medis dan guru merupakan rencana awal dari untuk melancarkan usaha pembangunan rumah sakit dan sekolah Muhammadiyah untuk Bangsamoro.

Untuk menjalankan perannya sebagai *enskiller*, Muhammadiyah memiliki kendala dalam hal biaya. Hal ini dikarenakan oleh “jam terbang” Muhammadiyah yang belum selebar anggota ICG yang lain. Apalagi kegiatan ini dilakukan diluar negara yang memerlukan banyak biaya untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan untuk mendukung proses perdamaian di Filipina Selatan.

Kendala tersebut diubah menjadi tantangan oleh Muhammadiyah. Untuk menghadapi tantangan tersebut Muhammadiyah telah melakukan beberapa promosi kemitraan. Promosi ini dilakukan dengan donor dan lembaga-lembaga kemanusiaan baik badan bilateral maupun multilateral di Indonesia maupun diluar Indonesia

untuk mendapatkan bantuan dana (Syamsuddin, n.d). Dana ini akan digunakan oleh Muhammadiyah untuk menjalankan program-programnya di Mindanao, Filipina Selatan.

Muhammadiyah juga memiliki peran sebagai unifier *yaitu* dengan mempersatukan dua kelompok separatism yang paling kuat di Mindanao, MNLF dan MILF. Muhammadiyah melakukan peran ini dengan menyelenggarakan pembicaraan informal antara pemimpin inti MNLF dan MILF. Hal ini menjadi penting karena perjanjian MILF-Pemerintah Filipina ini akan menggantikan ARMM yang telah disepakati oleh pemerintah Filipina dan MNLF tahun 1996. MNLF dan MILF dianggap satu yaitu sebagai Bangsamoro (Fisas, 2012)

Muhammadiyah bekerjasama dengan Kemenlu (Kementrian Luar Negeri) Indonesia, CDCC (Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations), dan Cheng Ho Multi Cultural and Education Trust mengadakan pembicaraan informal sebagai bagian dari WPF (World Peace Forum) di Bogor, Jawa Barat pada 23 – 25 November 2012 (Syamsuddin, n.d). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh ketua OPPAP yaitu Teresita Dalas untuk

mengawasi jalannya perundingan tersebut. Pertemuan ini menghasilkan perjanjian pengembangan Joint Road Map MNLF dan MILF yang telah disepakati sebelumnya dengan pemerintah Filipina.

Dalam rangka mempersatukan MNLF dan MILF, Muhammadiyah juga diminta membantu memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan MILF dengan ketua MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) yaitu Taufik Kiemas. Pertemuan ini dilakukan di Jakarta pada 23 Februari 2012. Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan nasehat dan pendapat dari tokoh Indonesia yaitu Taufik Kiemas tentang proses perdamaian yang sedang dilakukan antara pemerintah Filipina dan MILF. Muhammadiyah telah dipercaya untuk menjembatani pertemuan antara MILF dan Taufik Kiemas di Jakarta atas permintaan kedua pihak (Republika, 2012). Dengan menyiapkan pertemuan tersebut, Muhammadiyah dapat dikatakan berperan sebagai *convener*. Berbeda dengan peran unifier, dalam peran ini, Muhammadiyah membantu dalam bidang teknis saja.

## 6. Conciliation Resources

Sebagai anggota ICG, Conciliation Resources telah melakukan penjelajahan terhadap MILF dan pemerintah Filipina. Perwakilan Conciliation Resources telah datang dalam acara konsultasi massal yang dilakukan oleh pimpinan MILF kepada anggotanya untuk memberikan arahan tentang perdamaian pada bulan Juli 2012 (Conciliation Resources, 2012). Dalam acara yang didatangi oleh kurang lebih 200.000 Bangsamoro (MILF), pimpinan MILF memberi arahan dan dapat mengemukakan perasaan dan pendapat mereka tentang perdamaian yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah Filipina dan MILF (Conciliation Resources, 2012). Para pemimpin MILF dapat mendengarkan pendapat langsung dari anggota secara terbuka. Acara ini tidak disia-siakan oleh perwakilan Conciliation Resources yang telah datang, mereka dapat mengeksplorasi keluhan Bangsamoro sehingga dapat dijadikan data oleh Conciliation Resources dalam rapat ICG. Dari penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa Conciliation Resources telah berperan sebagai *explorer*.

Conciliation Resources juga berperan sebagai *enhancer* dan *enskiller* dengan mendatangkan beberapa ahli

yang memiliki kapasitas dan pengalaman dibidang *peacemaking*. Dalam perannya sebagai *enhancer*, Conciliation Resources telah mendatangkan Profesor Christine Bell yang telah memiliki pengalaman dalam hal negosiasi perdamaian konflik di Irlandia Utara dan Shadia Marhaban yang merupakan satu-satunya tokoh wanita dalam GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang memiliki pengalaman dalam hal negosiasi perdamaian di Aceh. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk mengadakan dialog yang dikemas dalam program *dialogue series* pada tahun 2011 tentang partisipasi perempuan dalam proses perdamaian.

Christine Bell dan Shadia Marhaban didatangkan untuk memberikan solusi terhadap tantangan yang ada pada proses perdamaian di Filipina Selatan. Tantangan gender telah menjadi perhatian Conciliation resources (Herbolzheimer & Leslie, 2013). Kekuasaan yang ada pada masyarakat di Mindanao dianggap tidak merata karena kurangnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya ketidakmerataan hasil-hasil dari proses perdamaian yang tidak mencerminkan kepentingan perempuan. Kedua ahli ini diharapkan

dapat menjadi inspirasi perempuan-perempuan Bangsamoro untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian.

Peran *enskiller* Conciliation Resources berkaitan dengan peran *enhancer* di mana mereka telah mendatangkan Christine Bell. Christine Bell tidak hanya melakukan seminar atau dialog tetapi juga memberikan arahan tentang perubahan konstitusi terhadap Mahkamah Agung (Conciliation Resources, 2011). Hal ini dapat meningkatkan kemampuan kedua pihak untuk menghadapi implementasi dari perdamaian agar dapat tahan lama. Selain itu, Conciliation Resources juga telah memfasilitasi kunjungan ke Barcelona, Spanyol dan mempelajari tentang otonomi daerah (Conciliation Resources, 2012).

Conciliation Resources telah berperan sebagai *facilitator* dengan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Conciliation Resources telah memfasilitasi penyelenggaraan pertukaran kunjungan yang dilakukan oleh Filipina dan Kolombia (Conciliation Resources, 2010). Hal ini dilakukan agar mereka dapat bertukar pendapat dan pengalaman mereka tentang konflik yang terjadi di masing-masing negara.

#### 7. HD Centre (Humanitarian Dialogue Centre)

Dalam menjalankan perannya sebagai anggota ICG, HD Centre telah membuat program MTT (Mindanao Think Tank) untuk pemerintah Filipina dan MILF yang berisi program-program dialog sebagai media untuk melakukan diskusi tentang proses perdamaian. Program ini dilakukan pada tahun 2009 – 2010 dan berisi 7 program dialog. HD Centre telah mengundang berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan konsultasi dan diskusi (Mindanao Think Tank, 2010).

Dialog yang pertama dilakukan oleh pimpinan MILF dan pimpinan suku Lumad yang merupakan suku asli Mindanao yang tidak beragama Islam dan Katolik dan tetap mempertahankan tradisi nenek moyang. Dialog yang kedua dilakukan oleh pemerintah Filipina dan LGU (Local Government Unit). Forum yang ketiga dilakukan dengan mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dengan para pemuda di Mindanao dan Manila. Dialog keempat dilakukan dengan mendatangkan para wanita di Mindanao. Yang kelima dilakukan dengan rohaniawan katolik. Kemudian dilakukan dengan praktisi

media, dan terakhir dilakukan dengan para pengungsi.

Dalam program MTT tersebut, HD Centre telah berperan sebagai *explorer* dengan memetakan berbagai masalah yang dihadapi warga Filipina khususnya Mindanao terkait konflik dan proses perdamaian. *Convener* dengan memberikan inisiatif pertemuan untuk dialog dengan berbagai kalangan, HD Centre menyiapkan semua keperluan teknis agar pertemuan tersebut berjalan dengan lancar. *Facilitator* dengan memfasilitasi komunikasi diantara pihak-pihak yang diajak berdiskusi dalam program MTT tersebut.

HD Centre juga berperan sebagai *reassurer* dengan menggunakan siaran radio untuk meyakinkan Bangsamoro. Masyarakat biasanya menggunakan radio untuk sekedar menghibur diri atau mendengarkan informasi. Dengan kemasannya radio, berita tentang segala kemajuan dalam proses perdamaian dapat disebarkan secara luas dan transparan. Dengan demikian masyarakat yang tidak ikut dalam proses perdamaian dapat mengikuti setiap perjanjian yang dihasilkan. Siaran tersebut juga berisi motivasi-motivasi untuk Bangsamoro tentang proses perdamaian.

Selain itu, HD Centre juga mendatangkan tiga ahli di bidang perdamaian untuk melakukan diskusi dengan pemerintah Filipina dan MILF pada 24 Januari 2012 (AFRIM, 2012). Ketiga ahli tersebut di antaranya adalah Dr. Katia Papagianni, ketua program bantuan mediasi HD Centre yang ahli dibidang transisi politik berdasarkan perjanjian perdamaian; Francesc Vendrell seorang diplomat yang selama 40 tahun terlibat di berbagai misi resolusi konflik di berbagai belahan dunia; dan Nureldin Satti, utusan khusus Jenderal PBB dan UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) pada proses perdamaian di wilayah Afrika (AFRIM, 2012).

#### 8. TAF (The Asia Foundation)

Dalam membantu proses perdamaian di Filipina, TAF memiliki beberapa tujuan, yaitu menyelesaikan konflik melalui peningkatan mekanisme penyelesaian konflik dan meningkatkan komunikasi antara masyarakat yang menjadi korban atau terkena dampak akibat konflik dengan pemerintah dan komunitas-komunitas tertentu, melakukan diskusi tentang isu substantif yang berorientasi dengan kebijakan dari beberapa *stakeholder*.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh proses perdamaian di Filipina Selatan adalah banyaknya pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai kalangan memiliki pendapat dan interpretasi masing-masing yang kadang tidak selaras dengan yang lain. Sehingga hal ini mempersulit jalannya proses perdamaian. Untuk itu TAF telah melakukan penjelajahan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Dalam menjelajahi dan memetakan masalah, TAF telah melakukan forum diskusi antara Bishops dan Ulama dalam Bishops-Ulama Conference pada tahun 2009 (The Asia Foundation, 2010). Ditingkat pedesaan, TAF telah melakukan diskusi dan konsultasi dengan masyarakat di Pedesaan (The Asia Foundation, 2010).

TAF juga melakukan penjajakan terhadap AFP (Armed Force Philippines) untuk memahami budaya, sejarah, dan kompleksitas konflik di Mindanao (The Asia Foundation, 2010). Berbagai upaya yang dilakukan oleh TAF untuk menggali informasi tentang keluhan dan pendapat dari Ulama, Bishop, Bangsamoro, dan AFP dapat menjadi bukti bahwa TAF telah berperan sebagai *explorer*. Dalam kegiatan tersebut, TAF juga berperan sebagai *facilitator* dengan

memfasilitasi komunikasi antara Ulama dan Bishop.

TAF juga aktif melakukan penelitian tentang konflik *clan* di Mindanao. TAF menganggap bahwa konflik *clan* juga mengambil peran penting dalam proses perdamaian (Philippines National Police & The Asia Foundation, 2013). TAF telah melakukan diskusi dengan berbagai *Clan* agar mereka bersatu dan melibatkan diri dalam proses perdamaian. Peran TAF untuk memperbaiki konflik *Clan* dapat disebut sebagai *unifier*. TAF disebut sebagai *unifier* karena telah membantu memperbaiki perpecahan beberapa *Clan*.

TAF telah aktif melibatkan wanita dalam proses perdamaian di Mindanao, Filipina Selatan. TAF yakin bahwa wanita memiliki peran yang besar dalam proses perdamaian karena mereka merasakan sendiri dampak dari konflik yang telah terjadi. TAF telah melatih wanita Mindanao untuk memberanikan diri mengikuti segala proses perdamaian yang ada. Dari pelatihan-pelatihan tersebut dapat dikatakan bahwa TAF memiliki peran sebagai *enskiller*.

TAF juga berperan sebagai *enhancer* dengan mendatangkan beberapa ahli di bidang perdamaian. TAF juga mengadakan workshop

pendidikan perdamaian dengan mendatangkan ahli perdamaian pada *first infantry division of the Philippines army* di kota Zamboanga (The Asia Foundation, 2010).

Peran yang sangat menonjol dilakukan oleh TAF adalah ketika Filipina sedang menggelar pemilihan umum pada tahun 2010. TAF bekerjasama dengan akademisi dari University of the Philippines Law School mencetak *policy paper* yang berjudul *Reframing the peace negotiations on Mindanao* (The Asia Foundation, 2010). Paper ini dibuat berdasarkan proses penjajakan dan pengalaman mereka dalam negosiasi pemimpin sebelumnya. Hal ini bertujuan agar nantinya presiden yang terpilih mendapatkan gambaran dan tuntunan agar mampu melanjutkan proses perdamaian dan menentukan kebijakan apa yang akan dibuat mengenai proses perdamaian. Peran TAF dalam menyediakan data untuk calon Presiden baru Filipina disebut sebagai *envisioner*.

#### 9. Peran Kolektif ICG (International Contact Group)

Dalam menjalankan perannya sebagai *explorer*, ICG telah melakukan pertemuan informal pada Februari 2010 (Mindanao Think Tank, 2010).

Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dari pemerintah Filipina dan MILF tentang posisi mereka dalam negosiasi yang berakhir tanpa persetujuan. Negosiasi yang dilakukan pada *17<sup>th</sup> Exploratory Talks* menjadi tantangan dalam keberlangsungan proses perdamaian. Negosiasi berhenti karena kedua pihak tidak dapat menerima masing-masing proposal yang diajukan karena memiliki perbedaan yang sangat jauh satu sama lain.

Kemudian, pada 8 Juni 2012 anggota NGO ICG telah melakukan kunjungan pertama kali dimarkas besar MILF di Camp Darapanan, Manguindanao yang jarang sekali bisa dilakukan (Conciliation Resources, 2012). Kesempatan ini dimanfaatkan untuk mencari informasi tentang kesiapan MILF dan konstituennya menjelang penandatanganan kerangka perjanjian damai yang terakhir.

Peran *convener* ICG juga berhubungan dengan berhentinya pembicaraan formal pada *17<sup>th</sup> Exploratory Talks*. ICG telah memberikan inisiatif untuk melakukan tiga pertemuan informal yang dilakukan pada bulan Februari, Maret, dan akhir April 2010. Pertemuan tersebut

dimaksudkan untuk memperbaiki proses perdamaian yang sempat berhenti.

ICG juga berperan secara kolektif sebagai *reassurer* pasca pemilihan Presiden yang dilakukan pada tahun 2010. Calon presiden yang terpilih menjadi Presiden baru Filipina adalah Benigno S. Aquino III. Di awal kepemimpinannya, Benigno banyak melakukan perubahan staf-staf yang menjabat sebagai perwakilan Filipina untuk proses perdamaian dengan MILF (Mindanao Think Tank, 2010). Benigno juga mengeluarkan kebijakan yang cukup berani dengan meminta Malaysia untuk mengganti perwakilannya sebagai fasilitator dalam proses perdamaian, yaitu Datuk Othman bin Abdul Razak. Pemerintah Filipina menganggap bahwa Othman memiliki kecenderungan terhadap kepentingan MILF yang akan mempersulit proses perdamaian (OPPAP, 2011).

Menanggapi hal ini, MILF tidak memberikan respon secara positif. MILF tidak menyetujui penggantian ini karena menganggap Othman sebagai fasilitator yang sangat berkomitmen dalam mengupayakan perdamaian di Filipina Selatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh ICG untuk meyakinkan kedua pihak untuk menyerahkan keputusan kepada

Malaysia. Akhirnya kedua pihak mau menyerahkan semua keputusan kepada Malaysia dan Malaysia memutuskan untuk mengganti Datuk Othman bin Abdul Razak dengan Tengku Dato Ghafar Tengku Mohamed.

ICG berperan sebagai *facilitator* dalam setiap pertemuan formal yang diadakan oleh pemerintah Filipina dan MILF. ICG telah terlibat dalam pertemuan formal pemerintah Filipina dan MILF yang telah dilakukan sebanyak 16 kali dari pertemuan yang dilakukan pada 9 Desember 2009 sampai pada penandatanganan kerangka perjanjian damai akhir tahun 2012. ICG telah menjembatani komunikasi masing-masing pihak dengan memberikan perspektif yang dapat mewakili kedua pihak. Peran fasilitator ICG saat negosiasi sangat dipengaruhi oleh peran yang dilakukan oleh masing-masing anggota ICG yang dilakukan sebelum proses negosiasi. Segala kontribusi yang dilakukan oleh anggota ICG dikumpulkan dan dibahas dalam rapat ICG. Rapat tersebut dilakukan di Manila secara rutin sebelum pertemuan formal dilaksanakan (Conciliation Resources, 2012). Masing-masing anggota ICG berbagi informasi dan harapan kedua pihak yang telah didapatkan

(Conciliation Resources, 2012). Rapat ini berkontribusi bagi ICG untuk memfasilitasi negosiasi antara pemerintah Filipina dan MILF.

ICG juga berperan sebagai *envisioner* dalam mediasi konflik antara pemerintah Filipina dan MILF. Dalam beberapa pertemuan, ICG diminta oleh kedua pihak atau salah satu pihak untuk memberikan pemikiran dan pilihan baru untuk merespon masalah yang dihadapi dalam proses negosiasi (Conciliation Resources, 2012). Tanggapan mengenai isu kadang-kadang juga diminta oleh pihak-pihak yang mengalami kesulitan dalam negosiasi (Conciliation Resources, 2012).

Peran ICG yang paling besar adalah sebagai *guarantor* dalam proses perdamaian khususnya pada saat negosiasi. Proses perdamaian antara

pemerintah Filipina dan MILF telah mengalami dua kali kemogokan dalam pertemuan yaitu pada *17<sup>th</sup> Exploratory Talks* yang diadakan pada 27 – 28 Januari 2010 dan *22<sup>nd</sup> exploratory Talks* pada 22 – 24 Agustus 2011 (Fisas, 2012). Kedua pihak menolak masing-masing proposal karena perbedaan isi proposal. ICG melakukan berbagai pertemuan informal dengan masing-masing pihak agar kedua pihak kembali menegosiasikan proposal perdamaian akhir. Upaya ini dapat dikatakan berhasil dengan adanya penandatanganan Framework Agreement of Bangsamoro (FAB) pada 15 Oktober 2012. Pada penandatanganan FAB tersebut ICG juga berperan sebagai *legitimizer* untuk menambah prestis dan legitimasi perjanjian damai tersebut.

## E. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang ditulis dalam pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegagalan MOA-AD pada tahun 2008 menyebabkan kedua pihak yaitu pemerintah Filipina dan MILF membentuk kelompok mediasi yang terdiri dari Inggris, Turki, Jepang, Arab Saudi, Muhammadiyah,

Conciliation Resource, Humanitarian Dialogue Centre, The Asia Foundation. Anggota ICG mempunyai latar belakang yang berbeda-beda namun memiliki keterwakilan dengan kedua pihak baik kedekatan kultural, agama, maupun politik.

2. ICG memiliki peran secara individu yang dilakukan oleh masing-masing

anggota dan peran secara kolektif. Peran individu tersebut akan membantu anggota ICG untuk melakukan peran secara kolektif.

3. ICG memiliki peran fungsional dalam mediasi fasilitatif sebagai *explorer* dengan memetakan masalah, *reassurer* dengan meyakinkan kedua pihak, *unifier* dengan memperbaiki perpecahan, *enskiller* dengan mengembangkan

## F. SARAN

ICG telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses perdamaian antara pemerintah Filipina dan MILF namun terdapat beberapa hal yang masih dirasa kurang dalam tubuh ICG, yaitu

1. Kurang adanya koordinasi tentang fokus dan sistem kerja mereka, terdapat beberapa anggota yang melakukan hal yang sama terhadap pihak yang sama. Perlu ditegaskan

keterampilan Bangsamoro, *convener* dengan mengadakan pertemuan informal, *facilitator* dengan menjembatani komunikasi, *envisioner* dengan memberikan data dan ide, *enhancer* menyediakan ahli dan dana, *guarantor* untuk menjaga proses negosiasi, dan *legitimizer* sebagai penambah prestise dan legitimasi perjanjian antara pemerintah Filipina dan MILF.

dan dikoordinasikan dari awal untuk menyepakati tindakan yang akan dilakukan oleh masing-masing anggota.

2. Koordinasi renggang menyebabkan beberapa anggota tidak melaksanakan perannya dengan baik. Terdapat beberapa anggota yang tidak rutin mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dan MILF.

## F. REFERENSI

Adriano, F., & Parks, T. (2013). *The contested corners of Asia: Subnational conflict and international development assistance: The case of Mindanao,*

*Philippines*. Diakses 2 Februari 2014 dari <http://asiafoundation.org/resources/pdfs/MindanaoExecutiveSummary.pdf>

- Acikalin, S. N. (2011). Intra-state conflict as security threats in a globalized world with case study of Cyprus. *Humanity and social science journal*, 6 (1), 22 – 28. Diakses 20 Januari 2014 dari [http://www.idosi.org/hssj/hssj69\(1\)11/4.pdf](http://www.idosi.org/hssj/hssj69(1)11/4.pdf)
- AFRIM. (2012). *MILF leaders meet three int'l conflict resolution experts*. Diakses 16 Mei 2014 dari [http://www.afrim.org.ph/m\\_news-page.php?nid=24024#.U3uZPNKSx0o](http://www.afrim.org.ph/m_news-page.php?nid=24024#.U3uZPNKSx0o)
- Bauzon, Bernice Camille V. (2013). *Mindanao peace process Aquino's legacy – UK envoy*. Diakses 1 Juni 2014 dari <http://www.manilatimes.net/mindanao-peace-process-aquinos-legacy-uk-envoy/3200/>
- Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual review of sociology*, 12, 67 – 92. Diakses 21 Januari 2014 dari <http://www.jstor.org/stable/2083195>
- Bohmelt, Tobias. (2011). *International mediation interaction: Synergy, conflict, effectiveness*. Germany: Springer Fachmedien Weisbaden GmbH.
- Conciliation Resources. (1999). *Compromising on autonomy: Mindanao in transition*. Diakses 26 Maret 2014 dari [http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/06\\_Mindanao\\_1999\\_ENG\\_F.pdf](http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/06_Mindanao_1999_ENG_F.pdf) (Accord 6)
- Conciliation Resources. (2009). *Framework agreement on the formation of the International Contact Group for the GRP-MILF peace process*. Diakses 28 September 2013 dari [www.c-r.org/sites/c-r.org/files/2009%20Agmt%20ICG%20formation.pdf](http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/2009%20Agmt%20ICG%20formation.pdf)
- Conciliation Resources. (2010). *Exchange project: Philippines and Colombia*. Diakses 26 Maret 2014 dari <http://www.c-r.org/featured-work/exchange-project-philippines-and-colombia>
- Conciliation Resources. (2011). *The Philippines: Dialogue and exchange*. Diakses 26 Maret 2014 dari <http://www.c-r.org/our-work/philippines>
- Conciliation Resources. (2012). *MILF conducts mass consultations for peace*. Diakses 26 Maret 2014 dari <http://www.c-r.org/comment/bangsamoro->

- leadership-assembly-peace-  
process  
Conciliation Resources. (2012).  
*Mindanao's MILF study degrees of  
autonomy in Catalonia*. Diakses 26  
Maret 2014 dari [http://www.c-  
r.org/news/milf-study-degrees-  
autonomy-catalonia](http://www.c-<br/>r.org/news/milf-study-degrees-<br/>autonomy-catalonia)
- Embassy of Japan. (2012). *Japan turns  
over training centers for  
development of human resources  
and technical-vocational skills in  
Mindanao*. Diakses 27 Maret 2014  
dari [http://www.ph.emb-  
japan.go.jp/pressandspeech/press/p  
ressreleases/2012/52.htm](http://www.ph.emb-<br/>japan.go.jp/pressandspeech/press/p<br/>ressreleases/2012/52.htm)
- Fisas, Vicenc. (2012). *2012 yearbook of  
peace processes*. United Kingdom:  
Icaria editorial/Escola de Cultura  
de Pau, UAB
- Fukunaga, Kei. (2013). *Japan's  
contribution to the Mindanao  
peace and development: Views  
from the ground*. Diakses 31  
Desember 2013 dari  
[http://peacebuilding.asia/japans-  
contribution-to-the-mindanao-  
peace-and-development-views-  
from-the-ground/](http://peacebuilding.asia/japans-<br/>contribution-to-the-mindanao-<br/>peace-and-development-views-<br/>from-the-ground/)
- Government of United Kingdom. (2013).  
*Supporting regional peace and  
security in the Philippines*. Diakses  
3 April 2014 dari  
[https://www.gov.uk/government/pr  
iority/supporting-regional-peace-  
and-security-in-the-philippines](https://www.gov.uk/government/pr<br/>iority/supporting-regional-peace-<br/>and-security-in-the-philippines)
- Guerra, Lizzie. (2010). *Mindanao conflict:  
Structural disempowerment in the  
Southern Philippines*. Diakses 16  
Oktober 2013 dari  
[http://www.usfca.edu/uploadedFile  
s/Destinations/College\\_of\\_Arts\\_an  
d\\_Sciences/Undergraduate\\_Progra  
ms/Peace\\_and\\_Justice\\_Studies/Stu  
dent\\_Research/Philippines.pdf](http://www.usfca.edu/uploadedFile<br/>s/Destinations/College_of_Arts_an<br/>d_Sciences/Undergraduate_Progra<br/>ms/Peace_and_Justice_Studies/Stu<br/>dent_Research/Philippines.pdf)
- Herbolzheimer, Kristian, & Leslie, Emma.  
(2013). *Innovation in mediation  
support: The International Contact  
Group in Mindanao*. Diakses 3  
Oktober 2013 dari [http://www.c-  
r.org/sites/c-  
r.org/files/PracticePaper\\_Mindanao  
ICG\\_ConciliationResources\\_0.pdf](http://www.c-<br/>r.org/sites/c-<br/>r.org/files/PracticePaper_Mindanao<br/>ICG_ConciliationResources_0.pdf)
- Jeong, Ho-Won. (2010). *Conflict  
management and resolution: An  
introduction*. New York: Routledge
- Mason, Simon J. A, & Kassam, Sabrin.  
(2011). Bridging worlds: Culturally  
balanced co-mediation. *Politorbis*,  
52: 69-74. Diakses 5 Februari 2014  
dari  
[www.css.ethz.ch/publications/pdfs/  
Politorbis-52-69-74.pdf](http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/<br/>Politorbis-52-69-74.pdf)

- MindaNews. (2012). *Japan welcomes framework of agreement concerning the Mindanao peace process*. Diakses 27 Maret 2014 dari <http://www.mindanews.com/eye/2012/10/08/28744/>
- Mindanao Think Tank. (2010). *Mindanao Think Tank: Perspectives, issues, and concerns on the Mindanao peace process*. Diakses 27 Maret 2014 dari [http://www.hdcentre.org/uploads/tx\\_news/70Monograph4.pdf](http://www.hdcentre.org/uploads/tx_news/70Monograph4.pdf)
- Minister of Foreign Affairs of Japan. (2014). *Statement by the Minister for Foreign Affairs on the Conclusion of the Mindanao Peace Negotiation*. Diakses 27 Maret 2014 dari [http://www.mofa.go.jp/press/releases/press4e\\_000169.html](http://www.mofa.go.jp/press/releases/press4e_000169.html)
- Mitchell, Cristhoper. (2003). *Contemporary peacemaking: Conflict, violent and peace process*. New York: Palgrave Macmillan Ltd.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- OPPAP. (2011). *New Malaysian facilitator for GPH-MILF talks named*. Diakses 16 Mei 2014 dari <http://www.opapp.gov.ph/milf/news/new-malaysian-facilitator-gph-milf-talks-named>
- Philippines National Police & The Asia Foundation. (2013). *Preventing RIDO: A practical guide for the police and other community peacekeepers*. Diakses 27 Maret 2014 dari <http://asiafoundation.org/publications/force-download.php?f=%2Fresources%2Fpdfs%2FPreventingRido.pdf>
- Republika. (2012). *Muhammadiyah jembatani pertemuan muslim Moro dan Ketua MPR*. Diakses 15 Mei 2014 dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/23/lzwtw5z-muhammadiyah-jembatani-pertemuan-muslim-moro-dan-ketua-mpr>
- Ritzer, George. (2007). *The blackwell encyclopedia of sociology*. UK: Blackwell Publishing.
- Santos, Soliman M. (2013). *The role of Islamic diplomacy in the Mindanao Peace Process*. Diakses 28 Maret 2014 dari <http://peacebuilding.asia/the-role->

- of-islamic-diplomacy-in-the-mindanao-peace-process/  
 Silalahi, Ulber. (2012). *Metode penulisan sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Snitwongse, Kusuma, & Thompson, W Scott. (2005). *Ethnic conflict in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS Publications Institute of Southeast Asian Studies.
- Syamsuddin, Din. (n.d). *Muhammadiyah's experience in interfaith peace building and conflict resolution: The case of Mindanao*. Diakses 8 April 2014 dari <http://www.m-dinsyamsuddin.com/index.php/paper/148-muhammadiyah-s-experience-in-interfaith-peace-building-and-conflict-resolution-the-case-of-mindanao>
- The Asia Foundation. (2010). *Conflict management in the Philippines*. Diakses 27 Maret 2014 dari <http://asiafoundation.org/publications/force-download.php?f=%2Fresources%2Fpdfs%2FConflictphilippines.pdf>
- Trijono, Lambang. (Ed.). (2004). *The making of ethnic & religious conflicts in Southeast Asia: Cases and resolutions*. Yogyakarta: CSPS
- Tuminez, Astrid S. (2008). Neither sovereignty nor autonomy: Continuing conflict in the Southern Philippines. *American Society of International Law*. 102, 122 – 125. Diakses 21 Januari 2014 dari <http://www.jstor.org/stable/250002>